

## **Menelaah Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Laporan Realisasi Anggaran: Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2021**

**Nor Hidayati<sup>1</sup>, Lasando Lumban Gaol<sup>2</sup>, Pesi Suryani<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Universitas Terbuka*

*Correspondence: [pesi@campus.ut.ac.id](mailto:pesi@campus.ut.ac.id)*

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Bogor City Government through analysis of the 2019-2021 budget realization report. The method applied is a descriptive quantitative approach using the level of efficiency and effectiveness as its evaluation parameters. The results of the analysis of the Bogor City Government Realization Report revealed that financial performance in the 2019-2021 range showed variations, with the average expenditure budget efficiency level reaching 89.97%. With these criteria, it can be concluded that the government has been able to manage the expenditure budget with an adequate level of efficiency, showing good ability in this regard. The level of effectiveness of the Bogor City Original Revenue (PAD) during the 2019-2021 period reached an average of 113.20%, which can be categorized as very effective. Although there was a decrease in 2020, the figure was still in the highly effective category with a percentage exceeding 100%. This indicates that the Bogor City Regional Government has been very successful in achieving the Regional Original Revenue revenue target.

**Keywords:** Efficiency, Effectiveness, Financial Performance

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor melalui analisis Laporan realisasi anggaran tahun 2019-2021. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan tingkat efisiensi dan efektivitas sebagai parameter evaluasinya. Hasil analisis Laporan Realisasi Pemerintah Kota Bogor mengungkapkan bahwa

kinerja keuangan dalam rentang tahun 2019-2021 menunjukkan variasi, dengan tingkat efisiensi anggaran belanja rata-rata mencapai 89,97%. Dengan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mampu mengelola anggaran belanja dengan tingkat efisiensi yang memadai, menunjukkan kemampuan yang baik dalam hal ini. Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor selama periode 2019-2021 secara keseluruhan mencapai rata-rata sebesar 113,20%, yang dapat dikategorikan sebagai sangat efektif. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020, namun angka tersebut masih tetap berada dalam kategori sangat efektif dengan persentase yang melebihi 100%. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah sangat berhasil dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Kinerja Keuangan

---

## Pendahuluan

Prinsip Good Governance merupakan tujuan yang diperjuangkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan manajemen publik. Prinsip ini mencakup sejumlah indikator penting, termasuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsabilitas (Jefri et al., 2018). Untuk mencapai Good Governance, implementasi nilai-nilai Good Governance dalam praktik-praktik penyelenggaraan manajemen publik dengan dasar hukum yang kuat diperlukan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan dalam proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya disertai dengan kepercayaan untuk mengelola aspek keuangan (Walandouw et al., 2015).

Salah satu langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah daerah setelah memenuhi kewajiban mereka dalam mengelola keuangan daerah adalah menyusun sistem laporan keuangan daerah yang memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai prinsip tata pemerintahan yang baik, atau yang dikenal sebagai Good Governance. Laporan keuangan tersebut

seharusnya dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku (Syairozi et al., 2021). Pentingnya menganalisis kinerja pemerintah daerah melalui laporan keuangan daerah menjadi semakin jelas. Analisis ini mencakup pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian hasil kegiatan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan, kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, serta efektivitas tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan (Mohamad Mahsun, 2019: 2.4). Salah satu tindakan konkret yang harus diambil oleh pemerintah daerah setelah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola keuangan daerah adalah mengembangkan sistem pelaporan keuangan daerah yang memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian mengenai evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui pelaksanaan anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain oleh Dien et al. (2015); Dona & Lestari (2020); Walandouw et al. (2015) dan Hapsari (2020), dan (Chartady et al., 2022). Hasil studi yang dilakukan oleh Dien et al. (2015) menyajikan bahwa dalam konteks Dinas Pendapatan Kota Bitung pada periode Anggaran 2009-2013, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai tingkat yang sangat efektif, sementara efisiensi penggunaan anggaran belanja secara keseluruhan mengalami ketidaksempurnaan karena tingkat pengeluaran yang terlalu tinggi. Di sisi lain, Dona & Lestari (2020) mengungkapkan dalam penelitian mereka bahwa kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU, berdasarkan analisis tingkat ekonomi selama tahun 2013-2017, menunjukkan variasi tingkat ekonomi rata-rata sekitar 89,48%, dengan penilaian cukup ekonomis. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjalankan pengeluaran sudah tergolong baik. Temuan lainnya dari penelitian yang dilakukan oleh Walandouw et al. (2015) juga mengonfirmasi tingkat efektivitas yang tinggi dalam penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung selama periode Anggaran 2009-2013, meskipun secara keseluruhan terdapat kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja, yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengeluaran.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan mengingat signifikansi kinerja keuangan pemerintah daerah serta fenomena penurunan realisasi anggaran di Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2020, peneliti terdorong untuk mengambil inisiatif dalam melakukan penelitian serupa. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor yang akan dievaluasi melalui Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2019 hingga 2021. Penggunaan jangka waktu ini dipilih karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penundaan berbagai kegiatan fisik dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi, yang pada gilirannya memengaruhi realisasi anggaran di berbagai daerah di Indonesia. Pada khususnya, Kota Bogor mengalami penurunan realisasi belanja sebesar 17% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Harahap, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola keuangan daerah. Analisis laporan keuangan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja pemerintah daerah dalam konteks Good Governance.

## **Telaah Literatur**

### **Stakeholder Theory**

Beberapa pandangan tentang konsep stakeholder, seperti yang diungkapkan oleh Freeman (1984), mendefinisikan stakeholder sebagai sekelompok individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. Menurut pandangan Mianti & Fachruzzaman (2020), stakeholder adalah sekelompok individu atau organisasi yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap suatu organisasi karena tindakan, tujuan, dan kebijakan yang diterapkan oleh organisasi tersebut dapat berdampak pada mereka.

Pemerintah merupakan salah satu elemen yang berperan dalam membentuk masyarakat dalam kerangka sistem sosial yang berlaku. Situasi ini menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan lain, yang berarti bahwa pemerintah harus menjalankan perannya dalam dua arah untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam suatu sistem sosial. Setiap tindakan atau

kebijakan yang diambil oleh setiap elemen dari pemangku kepentingan atau stakeholder akan memiliki dampak yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Pemerintah daerah, bersama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memajukan suatu wilayah. Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka memiliki potensi untuk memengaruhi kemajuan suatu daerah (Verawaty et al., 2020). Kepentingan masyarakat terletak pada bagaimana Pemerintah daerah mengelola dana publik, dan jika Pemerintah mampu mengelola keuangan dengan efisien, maka masyarakat juga akan merasakannya melalui peningkatan pelayanan yang lebih baik dan penyediaan fasilitas umum yang bermutu. Kepentingan masyarakat ini tercermin dalam pengelolaan anggaran atau dana yang disahkan oleh pemerintah, yang menjadi gambaran dari berbagai kebutuhan yang ada di tengah masyarakat.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik, yang diberikan definisi oleh Bastian (2009:3), adalah alat teknis dan analitik akuntansi yang digunakan untuk mengelola keuangan publik dalam berbagai jenis entitas, termasuk lembaga tinggi negara, departemen pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), LSM, yayasan sosial, serta proyek bersama antara sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik memiliki manfaat utama dalam menyajikan laporan keuangan melalui penggunaan standar klasifikasi akun, prosedur pencatatan, dan penjurnalan yang sesuai dengan alur bisnis organisasi sektor publik, mencakup proses penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan akuntansi. Salah satu kelebihan lain dari akuntansi sektor publik adalah bahwa laporan keuangannya memiliki tingkat kualitas yang tinggi. Selain itu, akuntansi sektor publik juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja di bidang keuangan dan ekonomi. Hal ini membantu pemerintah untuk lebih berfokus pada sektor-sektor yang berbeda, dan juga mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

## **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang sering disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari berbagai sumber berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di wilayah setempat. Sumber-sumber utama PAD meliputi kekayaan daerah, pendapatan dari pajak daerah, penerimaan dari redistribusi daerah, dan hasil dari pengelolaan kekayaan yang ada di daerah seperti yang dijelaskan oleh Setiawan et al. (2022). Konsep ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam Pasal 1 Nomor 18. Dalam konteks penggunaannya, PAD, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Diharapkan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang didanai oleh pendapatan tersebut. Selain itu, besarnya penerimaan PAD juga berdampak langsung pada tingkat kemajuan pembangunan yang terjadi di daerah tersebut, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Nasir, 2019).

## **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran adalah sebuah dokumen yang memuat detail mengenai pelaksanaan pendapatan dan belanja suatu organisasi yang selanjutnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan proyeksi mengenai sumber daya ekonomi yang diperkirakan akan diterima untuk mendukung aktivitas pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan ketidakpastian sumber daya ekonomi tersebut (sebagaimana dijelaskan oleh Mahsun, 2015, halaman 120). Laporan realisasi anggaran adalah sebuah dokumen yang memuat detail mengenai pelaksanaan pendapatan dan belanja suatu organisasi yang selanjutnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan proyeksi mengenai sumber daya ekonomi yang diperkirakan akan diterima untuk mendukung aktivitas pemerintah pusat dan daerah, serta

mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan ketidakpastian sumber daya ekonomi tersebut (sepaimana dijelaskan oleh Mahsun, 2015, halaman 120).

### **Efektivitas**

Menurut Indra Bastian (2020), efektivitas mengungkapkan apakah tujuan berhasil dicapai atau tidak dengan ukuran efektivitas adalah refleksi output. Jika setiap tujuan tercapai, proses kerja organisasi berhasil. Tingkat efektivitas pendapatan mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, semakin baik kemampuan daerah tersebut. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Hubungan antara efektivitas PAD dan kinerja keuangan daerah adalah bahwa pencapaian optimal PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah (sesuai dengan penjelasan oleh Anynda & Hermanto (2020).

### **Efisiensi**

Indra Bastian (2020) menyatakan efisiensi didapatkan dengan membandingkan output dan input. Kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah bisa disebut efisien jika suatu hasil kerja tertentu berhasil diselenggarakan menggunakan anggaran sehemat mungkin. Efisiensi memiliki kaitan erat terhadap konsep produktivitas. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan output dengan input, bisa mencapai sebutan efisien bila hasil kerja yang telah dilaksanakan terselenggara dari sumber daya dan dana serendah-rendahnya (Ahmad et al., 2020).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data disatukan, ditata, dianalisis kemudian diinterpretasikan dengan menjelaskan hasil yang didapatkan hingga memperoleh keterangan yang lengkap untuk permasalahan yang dihadapi. Data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2021. Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif

kuantitatif dengan perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas dari Laporan Realisasi Anggaran. Deskriptif adalah metode analisis statistik yang melibatkan penyajian data yang telah dikumpulkan secara rinci dan objektif tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum atau melakukan generalisasi (Dona & Lestari, 2020b).

Penggunaan metode analisis adalah sebagai berikut:

### 1. Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

Perhitungan efisiensi melibatkan pengukuran output organisasi sektor publik dalam hubungannya dengan tingkat output sektor publik secara keseluruhan. Data yang digunakan untuk perhitungan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor untuk periode tahun 2019-2021, dan dihitung menggunakan rumus berikut ini (Mohamad Mahsun, 2019):

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi dan kriteria sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 mengenai Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Rasio Efisiensi

<b>Rasio Efisiensi (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 (dalam Mustika Hapsari, et all. 2022)

### 2. Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD

Perhitungan tingkat efektivitas berhubungan dengan dicapainya tujuan sesuai kebutuhan secara tepat. Data yang dipakai untuk perhitungan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota

Bogor tahun 2019-2021, dengan menerapkan rumus berikut ini (Mohamad Mahsun, 2019):

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Bersumber dari putusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 mengenai kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan rasio dan kriteria efektivitas sebagai berikut:

**Tabel 2.** Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 (dalam Mustika Hapsari, et all. 2022

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Perhitungan Anggaran Belanja Menggunakan Rasio Efisiensi

Perhitungan rasio efisiensi dipakai untuk mengukur tingkat ouput organisasisektor publik terhadap tingkat input-nya agar menemui hasil sudah efektifatau tidak. Efisiensi anggaran belanja

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

dapat diketahui melalui perhitunganberikut ini:

a. Tahun 2019

$$Efisiensi = \frac{1\ 2.526.504.949.919,19}{2.871.218.762.599,52} \times 100\% = 87,99\%$$

b. Tahun 2020

$$Efisiensi = \frac{2.353.736.171.982,00}{2.641.028.498.058,19} \times 100\% = 89,12\%$$

c. Tahun 2021

$$Efisiensi = \frac{2.636.065.820.905,00}{2.839.909.070.361,00} \times 100\% = 92,82\%$$

**Tabel 3.** Efisiensi Realisasi Anggaran

Tahun	Anggaran Belanja (dalam Rupiah)	Realisasi Belanja (dalam Rupiah)	Efisiensi (%)	Kriteria
2019	2.526.504.949.919,19	2.871.218.762.599,52	87,99%	Cukup Efisien
2020	2.353.736.171.982,00	2.641.028.498.058,19	89,12%	Cukup Efisien
2021	2.636.065.820.905,00	2.839.909.070.361,00	92,82%	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel efisiensi realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor tahun 2019 sampai 2021, menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat efisiensi. Hasil presentase dari rasio di atas, tahun 2019 efisiensi realisasi anggaran berada pada kriteria cukup baik dengan perolehan 87,99%. Ini menunjukkan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor sudah cukup baik dalam mengelola kinerja keuangan. Pada tahun 2020 ada peningkatan presentase efisiensi realisasi anggaran belanja sebesar 1,13%. Peningkatan ini menandakan ada penurunan efisiensi sebab semakin rendah presentase efisiensi artinya kinerja pemerintah semakin baik. Dengan presentase sebesar 89,12% pada tahun 2020, meski mengalami kenaikan namun masih dalam kriteria cukup baik. Sedangkan pada tahun 2021, efisiensi realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor kurang efisien dengan presentase 92,82%.

### Hasil Perhitungan Efektivitas PAD

Perhitungan tingkat efektivitas berhubungan dengan tercapainya tujuan sesuai kebutuhan secara tepat. Efektivitas realisasi penerimaan PAD dapat diketahui dengan melakukan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Tahun 2019

$$Efektivitas = \frac{1.015.884.216.919,86}{972.607.288.978,00} \times 100\% = 104,45\%$$

b. Tahun 2020

$$Efektivitas = \frac{872.017.242.152,12}{741.531.123.201,00} \times 100\% = 117,60\%$$

c. Tahun 2021

$$Efisiensi = \frac{1.075.240.926.213,11}{914.550.650.320,00} \times 100\% = 117,57\%$$

Perhitungan efektivitas realisasi penerimaan PAD Pemerintah Kota Bogor tahun 2019-2021, dapat diringkas dalam tabel berikut:

**Tabel 4.** Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (dalam Rupiah)	Target Penerimaan PAD (dalam Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	1.015.884.216.919,86	972.607.288.978,00	104,45%	Sangat Efektif
2020	872.017.242.152,12	741.531.123.201,00	117,60%	Sangat Efektif
2021	1.075.240.926,213,11	914.550.650.320,00	117,57%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel di tersebut dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan PAD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2021 dapat dikatakan sangat efektif dengan berada dipresentase lebih dari 100%. Dalam tiga tahun, Pemerintah Kota Bogor mampu meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan PAD dengan presentase 104,45% pada tahun 2019, 117,60% pada tahun 2020 dan 117,57% pada tahun 2021.

Selama tiga tahun, penerimaan PAD Pemerintah Kota Bogor selalu melebihi target penerimaan. Meskipun ada penurunan presentase sebesar 0,03% di tahun 2021, tetapi tetap dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja pemerintah daerah Kota Bogor cukup efisien dengan pencapaian 89,99%. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 ada penurunan realisasi anggaran sebesar 1,13% dengan nilai efisiensi 89,12%. Pada tahun 2021 ada penurunan kembali sebesar 3,70% dengan efisiensi 92,82%. Penurunan dari efisiensi realisasi anggaran Kota Bogor selama tiga tahun berturut-turut tersebut menandakan kriteria dan tingkat efisiensi anggaran belanja dilihat secara keseluruhan sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 kurang efisien disebabkan pemakaian anggaran belanja yang terlalu tinggi dan tingkat efisiensinya hampir mendekati 100%.

Realisasi penerimaan PAD Kota Bogor dari tahun 2019 sampai 2021 sangat efektif. Pada tahun 2019 presentase efektivitas mencapai 104,45%. Tahun 2020 presentase realisasi penerimaan PAD meningkat sebesar 13,15%. Tahun selanjutnya yaitu 2021 terdapat penurunan realisasi penerimaan PAD sebesar 0,03% dengan presentase sebesar 117,57%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2021, tetapi presentase penerimaan PAD pada tiga tahun tersebut tetap berada pada kriteria sangat efektif. Kriteria sangat efektif dalam realisasi penerimaan PAD menandakan satuan kerja Pemerintah Kota Bogor dapat merealisasikan anggaran yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini secara konsisten mendukung temuan-temuan yang telah dicapai oleh penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Dien et al. (2015); Dona & Lestari (2020); Walandouw et al. (2015), yang secara kolektif menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai kinerja keuangan yang optimal melalui efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) yang menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memberikan kinerja optimal untuk kepentingan publik atau masyarakat.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah berhasil menjalankan pengelolaan anggaran dengan tingkat efisiensi yang memadai selama periode 2019 hingga 2021. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bogor secara umum efisien dalam menggunakan anggaran belanja, dengan tingkat efisiensi mendekati 90%. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensinya melebihi 90%.

Selain itu, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor selama periode tahun anggaran 2019 hingga 2021 dinilai sangat efektif. Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil mengumpulkan pendapatan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat efektivitas yang melebihi 100%.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat meningkatkan efisiensi realisasi anggaran belanja agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah sangat baik dalam penarikan Pendapatan Asli Daerah, kinerja ini perlu dipertahankan agar mampu meningkatkan kesuksesan daerah otonom guna mencapai tujuan sebagai daerah yang mandiri. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sehingga informasi yang diberikan hanya bersifat deskriptif dan tidak menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengadopsi pendekatan kualitatif atau metodologi campuran yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor tersebut. Metode kualitatif dapat melibatkan wawancara mendalam, studi kasus, atau analisis konten untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang faktor-faktor yang relevan dalam konteks tersebut.

### **Bibliografi**

- Ahmad, A. W., Eka Putri, G., Akuntansi, J., & Padang, P. N. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 166–181. [www.jaga.unand.ac.id](http://www.jaga.unand.ac.id)
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–20.
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). *Open Journal Systems*, 17(1), 93–100.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–

541.

- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020a). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Jefri, R., Negeri, U., & Abstrak, M. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. In *Riny Jefri* (Vol. 4, Issue 003).
- Mianti, R., & Fachruzzaman. (2020). Analysis Financial Performance of Regional Government in Bengkulu Province. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 164–174.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i1.421](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421)
- Setiawan, A. B., Melani, M. M., & Tsaniyah, I. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(6), 814–823.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 978–623.
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1), 21–37.
- Walandouw, S., Tinangon, J., & Dien, A. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 534–541.